

EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PROSEDUR PENGELUARAN KAS PADA PT. JAMSOSTEK di KOTA MANADO

¹Franklyn Palungan, ²Herman Karamoy, ³Inggriani Elim

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
Email: Franklynpalungan@yahoo.co.id

ABSTRAK

Salah satu aspek penting dalam suatu perusahaan adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan dan penggelapan maupun penyimpangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peranan pengendalian internal terhadap prosedur pengeluaran kas yang diterapkan PT. Jamsostek. Sampel yang digunakan yaitu prosedur pembayaran klaim Jaminan Hari Tua, Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Dari penelitian yang dilakukan maka diketahui telah memiliki unsur-unsur pengendalian internal seperti struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab secara tegas, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan praktik yang sehat dengan adanya perincian pembayaran untuk menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan PT. Jamsostek menetapkan bahwa sistem pembayaran klaim tidak boleh dilakukan oleh bagian kasir dari awal sampai akhir dan harus melibatkan verifikator jaminan. Setiap pembayaran klaim hanya terjadi atas dasar otorisasi dari kepala bagian keuangan. Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa PT. Jamsostek sudah memenuhi unsur-unsur pengendalian internal.

Kata Kunci : Pengendalian internal, Prosedur Pengeluaran, Pengeluaran Kas

ABSTRACT

One important aspect of a company is the system of internal control. Internal control system are policies and procedures that protect assets from misuse and embezzlement and irregularities. The purpose of this study was to evaluate the role of internal control over cash disbursements procedures applied by PT. Social Security. Samples were used that procedure claims payments Old Age Security, Accident and Life Insurance. From research conducted then known to have had elements of internal control as an organizational structure that strictly separates responsibility, the system of authorization and recording procedures, and practice healthy in payment details to avoid misuse and misappropriation PT. Jamsostek establishes that the system of payment of claims should not be done by the cashier from start to finish and should involve assurance verifier. Each payment claim only happen on the basis of the authorization of the chief financial officer. From the above results indicate that PT. Social Security has met the elements of internal control.

Keywords: Internal Control, Procedure Expenses, Cash Outlays

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dunia usaha di Indonesia saat ini sudah maju, bisa dilihat dari semakin banyaknya berdiri usaha-usaha baru yang didirikan oleh masyarakat. Salah satu aspek penting pada suatu perusahaan adalah Sistem Pengendalian Internal. Karena suatu perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya Sistem Pengendalian Internal yang baik.

Sistem Pengendalian Internal merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan. Sistem Pengendalian Internal dapat digunakan lebih efektif untuk mencegah penggelapan atau penyimpangan. Pada suatu perusahaan, pengendalian internal sangat dibutuhkan mengingat faktor-faktor yang meliputi luas dan entitas perusahaan yang sangat kompleks. Hal ini mengakibatkan manajemen harus percaya pada laporan-laporan serta analisis untuk operasi pengendalian Internal yang efektif.

PT. Jamsostek adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa asuransi. Asuransi merupakan suatu lembaga keuangan yang melaluinya dapat dihimpun dana, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, disamping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi.

Pada perusahaan asuransi evaluasi pengendalian internal sangat diperlukan guna mempermudah dan memberikan arahan dalam proses kegiatan perusahaan dimana dalam hal ini Kas adalah salah satu unsur aktiva yang paling penting karena kas merupakan alat pertukaran dan pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Manajemen bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran kas.

Dalam hal penerimaan kas, terdapat sumber penerimaan yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang. Sedangkan untuk pengeluaran kas dapat dilakukan melalui dua cara yaitu dengan menggunakan cek dan uang tunai.

Cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang di rekening giro. Fungsi lain dari cek adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran. Pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut, sedangkan uang tunai merupakan salah satu sarana yang digunakan sebagai alat pembayaran secara langsung. dilakukannya proses pengajuan klaim dari nasabah atau ahli waris ke perusahaan sampai dengan pencairan atau pembayaran dana atas klaim nasabah atau ahli waris yang diterima agar berjalan dengan efektif dan efisien, dan juga dapat memberi informasi-informasi yang baik untuk nasabah maupun kinerja perusahaan.

Dalam sebuah perusahaan asuransi yang setiap harinya pasti akan banyak menghadapi klaim asuransi dari nasabah atau ahli waris. Pengendalian internal atas pencairan dana atas klaim nasabah sangat penting dalam kegiatan pemrosesan perusahaan. Siklus pengeluaran kas dalam perusahaan asuransi adalah mengenai pengeluaran dana atas klaim nasabah sehingga evaluasi pengendalian internal untuk siklus pengeluaran sangatlah penting guna mempermudah pencairan dana dan mengetahui apakah terdapat satu proses yang terlewat.

Struktur pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dari definisi tersebut tujuan sistem pengendalian internal dapat dikelompokkan menjadi dua, pertama

pengendalian internal akuntansi (internal accounting control) yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi serta mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Kedua pengendalian internal administratif (internal control administrative control) yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengendalian internal terhadap Prosedur pengeluaran kas pada PT. JAMSOSTEK di Kota Manado.

Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah maka yang menjadi tujuan penelitian adalah: untuk mengevaluasi pengendalian internal terhadap prosedur pengeluaran kas pada PT. JAMSOSTEK di Kota Manado.

Tinjauan Pustaka

Sylvie Widyahapsari (2007) dalam penelitiannya yang dimuat dengan judul Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas Pada AJB BUMIPUTERA Kantor Cabang Asuransi Kumpulan Surakarta. Hasil penelitian adalah penulis melakukan penelitian dengan mengamati dan membandingkan teori yang ada dengan sistem pengendalian internal terhadap prosedur pengeluaran kas yang digunakan pada perusahaan tersebut. Pelaksanaan sistem pengendalian internal pada perusahaan secara keseluruhan sudah baik, sesuai dengan unsur-unsur pokok sistem pengendalian internal. Meskipun demikian, masih terdapat sedikit kekurangan yang perlu mendapat perhatian dari perusahaan, perangkapan aktivitas yang dilaksanakan oleh bagian-bagian perusahaan, tidak ada pemisahan fungsi antara fungsi penyimpanan kas dengan fungsi akuntansi, tidak diwajibkannya pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan sebaiknya pelaksanaan tugas dari masing-masing bagian dalam perusahaan dilaksanakan sesuai dengan yang tertuang dalam job description, perusahaan sebaiknya mengambil kebijakan untuk memisahkan fungsi antara fungsi penyimpanan kas dengan fungsi akuntansi, sehingga dapat menghindari penyalahgunaan terhadap kas, perusahaan sebaiknya melakukan mengambil kebijakan untuk mewajibkan mengambil cuti bagi karyawan yang berhak.

Persamaannya dengan skripsi ini adalah mengamati dan membandingkan teori yang ada dengan sistem pengendalian internal terhadap prosedur pengeluaran kas yang digunakan pada perusahaan tersebut. Perbedaannya adalah dalam jurnal tersebut diatas yang diteliti adalah hanya mengevaluasi sistem pengendalian internalnya saja sedangkan dalam skripsi ini juga untuk mengetahui penerimaan kas.

Rima Pulasari (2010) dalam penelitiannya yang dimuat dengan judul Evaluasi Sistem pengendalian internal Penjualan Jasa Pada PT. Industri Lift Indo Nusantara Kantor Cabang Semarang hasil penelitian adalah berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal penjualan jasa perawatan lift pada PT. industri Lift Indo Nusantara Kantor Cabang Semarang yang meliputi struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktek yang sehat serta karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung

jawabnya, telah sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan perusahaan dan tidak menyimpang dari teori yang terdapat dalam ilmu akuntansi.

Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama mengevaluasi tentang pengendalian internal. Perbedaannya adalah dalam jurnal tersebut membahas tentang pengendalian internal penjualan sedangkan dalam skripsi ini membahas pengendalian internal terhadap pengeluaran kas.

Landasan Teoritis

Konsep Akuntansi

American Accounting Association mendefinisikan akuntansi sebagai “proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”. definisi ini mengandung beberapa pengertian sebagai berikut (soemarso 2008 : 5):

1. Bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi.
2. Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.(segi kegunaan akuntansi).

Konsep Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan (*financial accounting*) adalah sebuah proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan baik pihak-pihak internal maupun eksternal (Kieso et al, 2008 : 2). (Soemarso et. al 2008 : 9) menjelaskan Akuntansi Keuangan sebagai bidang yang berkaitan dengan akuntansi untuk unit ekonomi secara keseluruhan. Dimana akuntansi keuangan berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak diluar perusahaan yang mempunyai kepentingan banyak macam ragamnya, maka laporan yang dihasilkan bersifat serbaguna (*general purpose*).Hal yang penting untuk diperhatikan dalam menyusun laporan keuangan untuk pihak-pihak ini adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum, adalah merupakan kewajiban dari sebuah perusahaan untuk mengikuti prinsip-prinsip tersebut dalam menyusun laporan mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan kepada pihak-pihak diluar perusahaan.

Pengendalian Internal

Menurut Mardiasmo (2009) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik, “pengendalian internal adalah untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Pengendalian internal meliputi beberapa aktivitas yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan
2. Koordinasi antara berbagai bagian dalam organisasi
3. Komunikasi informasi
4. Pengambilan keputusan
5. Memotivasi orang-orang dalam organisasi agar perilaku sesuai dengan tujuan organisasi
6. Pengendalian
7. Penilaian kerja

Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Arrens dan Loebbecke (2007) dalam bukunya yang berjudul Auditing, an Integrated Approach yang diterjemahkan oleh Jusuf, A.A “manajemen dalam merancang struktur pengendalian intern mempunyai kepentingan-kepentingan sebagai berikut :

1. Keandalan pelaporan keuangan
Manajemen bertanggung jawab dalam menyediakan laporan keuangan bagi investor, kreditor dan pengguna lainnya. Manajemen mempunyai kewajiban hukum dan

- profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai dengan standar laporan, yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Mendorong efisiensi dan efektifitas
Pengendalian dalam suatu organisasi adalah alat untuk mencegah pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek usaha, dan untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan efektif.
 3. Ketaatan pada hukum dan peraturan
Banyak sekali hukum peraturan yang harus diikuti oleh perusahaan, beberapa diantaranya berkaitan tidak langsung dengan akuntansi.

Komponen Pengendalian Internal

Menurut **COSO** (*The Committee Of Sponsoring Organizations*) dalam buku sistem informasi akuntansi, pengendalian internal terdiri dari 5 komponen yang saling terkait berikut ini :

1. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian menetapkan corak corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup hal-hal berikut :
 - a. Integritas nilai dan etika
 - b. Komitmen terhadap kompetensi
 - c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
 - d. Filosofi dan gaya operasional manajemen
 - e. Struktur organisasi
 - f. Pemberian wewenang dan tanggung jawab
 - g. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia
2. Penaksiran Resiko
Penaksiran resiko untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan identifikasi, analisis dan manajemen terhadap resiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola. Resiko yang relevan dalam laporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Resiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini :
 - a. Perubahan dalam lingkungan operasi
 - b. Personel baru
 - c. Sistem informasi yang baru atau yang baru diperbaiki
 - d. teknologi baru
 - e. Lini produk, produk atau aktivitas baru
 - f. Operasi luar negeri
 - g. Standar akuntansi baru
3. Aktivitas Pengendalian
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu bahwa arahan manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut :
 - a. Review terhadap kinerja
 - b. Pengolahan informasi
 - c. Pengendalian fisik
 - d. Pemisahan tugas
4. Informasi dan komunikasi

Sisitem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sitem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, hutang dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal.

5. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dan komunikasi dengan pihak luar seperti keluhan customers dan komentar dari badan pengatur yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

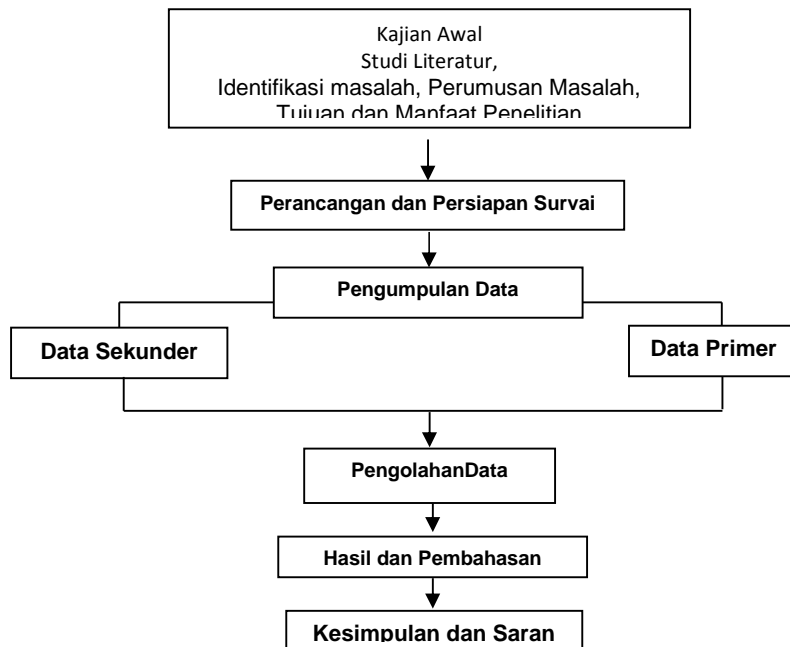
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif atau berbentuk uraian berupa penjelasan-penjelasan secara tertulis dan lisan dari sumber-sumber yang terkait dalam penelitian. Gambaran yang akurat diperoleh dengan mengumpulkan, mengklarifikasi data sehingga akan memberikan hasil yang konkrit pada permasalahan dan kemudian di analisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Tempat dan Waktu Penelitian

.Dalam penelitian ini, penulis mengambil tempat penelitian di PT. Jamsostek di Kota Manado.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian disajikan lengkap dan terinci tentang langkah-langkah yang akan dilakukan pada pelaksanaan penelitian ini. Adapun langkah-langkah prosedur penelitian digambarkan dalam bentuk diagram alur penelitian berikut ini.



Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan langkah-langkah dalam penelitian ini adalah :

1. Penulis melakukan kajian awal dengan melakukan studi literatur baik studi kepustakaan maupun membaca melalui internet.
2. Melakukan pengidentifikasian tentang masalah, merumuskannya, menetapkan tujuan dan manfaat penelitian,
3. Membatasi masalah ke lingkup yang disesuaikan dengan penelitian saat ini.
4. Perancangan dan persiapan survai pada objek penelitian yang telah ditentukan,
5. Pengumpulan data baik primer maupun sekunder.
6. Melakukan pengolahan data, membahasnya kemudian menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran guna melengkapi penelitian.

Sumber Data

Sumber data merupakan subyek data diperoleh dalam penelitian dan kemudian data tersebut digunakan sebagai dasar penelitian. data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu:

1. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dengan mengadakan penelitian langsung di objek penelitian.
2. Data sekunder
Data yang diperoleh dari berbagai literatur dan jurnal yang relevan dengan masalah yang diangkat.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang berasal dari perusahaan PT. Jamsostek berupa sistem prosedur pengeluaran kas terhadap klaim asuransi pembayaran jaminan.

Metode pengumpulan data

Dalam usaha untuk memperoleh data dan informasi yang berkenan dengan penelitian ini, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara dengan pimpinan perusahaan, wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bagian-bagian yang berkepentingan dan terlibat langsung dengan yang dibahas serta berhubungan dengan data yang diperlukan penulis.
2. Peninjauan langsung atau observasi tentang sistem kerja pengendalian internal, terutama yang berhubungan dengan prosedur pengeluaran kas atas klaim pembayaran jaminan asuransi.
3. Pengamatan prosedur-prosedur atau kebijakan yang dilaksanakan oleh perusahaan PT. Jamsostek.

Metode Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Mencari teori-teori yang mendukung penelitian
2. Mengumpulkan data dari objek penelitian, dalam hal ini yang menjadi objek penelitian penulis adalah perusahaan PT. Jamsostek.
3. Melakukan penelitian terhadap pengendalian internal terhadap prosedur pengeluaran kas atas kaim pembayaran jaminan asuransi.
4. Menarik suatu kesimpulan serta saran-saran mengenai pengendalian internal terhadap prosedur pengeluaran kas atas klaim pembayaran jaminan asuransi.

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan di perusahaan berupa cara-cara pemeriksaan intern menurut teori yang telah dikemukakan dan dihubungkan dengan pengendalian intern atas Prosedur Pengeluaran kas yang ada pada PT. JAMSOSTEK di Kota Manado kemudian, hasil perbandingan tersebut akan menunjukkan bahwa dengan dilaksanakannya pemeriksaan secara kontinyu maka akan tercipta suatu sistem pengendalian kas yang memadai.

Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul Evaluasi Pengendalian Internal terhadap Prosedur Pengeluaran Kas Pada PT. JAMSOSTEK di Kota Manado. Untuk mengintegrasikan judul, maka masing-masing kata mempunyai arti sebagai berikut :

1. Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.

2. Pengeluaran

Pengeluaran adalah proses atau cara mengeluarkan uang untuk menghasilkan sesuatu.

3. Kas

Kas adalah alat pembayaran berupa uang yang siap dan bebas di pergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan.

Secara keseluruhan pengertian yang terkandung dalam judul skripsi ini adalah penilaian terhadap salah satu bagian dalam lingkungan perusahaan yang mempunyai tugas menilai kegiatan-kegiatan dan memberikan saran kepada manajemen.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek penelitian

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara.

Indonesia seperti halnya berbagai Negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja, secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 dengan perubahan pada pasal 34 ayat 2, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengesahkan Amandemen tersebut, yang kini berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kiprah Perseroan yang mengedepankan kepentingan dan hak normative Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.

Dengan penyelenggaraan yang makin maju, program Jamsostek tidak hanya bermanfaat kepada pekerja dan pengusaha tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian bagi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan masa depan bangsa.

Hasil Penelitian

Evaluasi Pengendalian Internal Prosedur Pengeluaran Kas Menurut COSO Dengan Pengendalian Internal Prosedur Pengeluaran Kas Klaim Asuransi Jaminan Hari Tua (JHT) Pada PT. JAMSOSTEK

Tabel 4.1

Menurut COSO	Menurut Perusahaan	Keterangan
<p>A. Struktur Organisasi</p> <p>1. Memisahkan antara fungsi operasional, fungsi pencatatan dan fungsi penyimpanan.</p> <p>2. Transaksi pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kasir sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan dari fungsi lain.</p>	<p>A. Struktur Organisasi</p> <p>1. Fungsi penyimpanan pada PT. Jamsostek dilakukan oleh bagian bendahara, sedangkan fungsi pencatatan dilakukan oleh bagian akuntansi.</p> <p>2. Transaksi pengeluaran kas klaim JHT melibatkan lebih dari satu fungsi yaitu verifikator jaminan bendahara, kepada bidang keuangann, verifikator akuntansi/ verifikator keuangan, dan kepala bidang pelayanan.</p>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>
<p>B. Sistem Otorisasi dan Pencatatan.</p> <p>1. Pengeluaran kasharus</p>	<p>B. Sistem Otorisasi dan Pencatatan.</p> <p>1. Dokumen-dokumen yang di</p>	

<p>mendapatkan otorisasi pejabat yang berwenang.</p> <p>2. Pencatatan pengeluaran kas (atau dalam model tertentu) harus didasarkan kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan dilampirkan dengan dokumen pendukung yang lengkap.</p>	<p>gunakan pada klaim JHT harus diotorisasi seperti pada dokumen perincian pembayaran yang dibuat oleh bagian akuntansi, voucher, berkas pembayaran jaminan, cek/BG harus mendapat otorisasi kepala bagian keuangan.</p> <p>2. Pencatatan klaim JHT dilakukan berdasarkan perincian pembayaran dan cek beserta data pendukungnya yang telah diotorisasi, oleh kepala bagian keuangan pada klaim dengan melalui cek atau tunai.</p>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>
<p>C. Praktik yang Sehat</p> <p>1. Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus ditandai dengan cap lunas oleh bagian kasir setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan.</p> <p>2. Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan atau penerima pembayaran.</p> <p>3. Cek menggunakan nomor urut dan semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasir. Cek yang dibatalkan harus diletakan pada buku cek dan dirusak untuk menghindari penyalahgunaan.</p> <p>4. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak dan pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.</p>	<p>C. Praktik yang Sehat</p> <p>1. Perincian pembayaran klaim JHT , voucher pembayaran jaminan, cek dan data pendukungnya harus dicetak kuitansinya dan di cap lunas setelah dilakukan pembayaran klaim JHT.</p> <p>2. Pengeluaran kas klaim JHT dilakukan menggunakan voucher pembayaran jaminan atas nama penerima klaim.</p> <p>3. Cek yang digunakan menggunakan nomor urut dan bagian bidang keuangan harus mempertanggung jawabkan nomor urut cek untuk menghindari penggunaan cek yang tidak semestinya. Cek yang dibatalkan harus mendapat verifikasi dari verifikator jaminan.</p> <p>4. Voucher pembayaran klaim JHT, cek telah menggunakan nomor urut cetak.</p>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>

Unsur-unsur pengendalian internal terhadap pengeluaran kas pembayaran klaim Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja yang menjadi dasar pembahasan dan penilaian pengendalian internal yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian
 - a. Struktur organisasi

- memisahkan tanggung jawab secara tegas. Sebagai unsur pengendalian internal struktur organisasi pada PT. JAMSOSTEK menetapkan bahwa sistem pengeluaran kas pembayaran klaim Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja tidak boleh dilakukan oleh bagian kasir perusahaan dari awal sampai akhir. Pembayaran klaim Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja melibatkan Verifikator jaminan/ Verifikator keuangan, kepala bagian keuangan.
- b. Pemberian Wewenang dan Tanggung Jawab
Fungsi penyimpanan pada PT. JAMSOSTEK dilakukan oleh bagian bendahara sedangkan fungsi pencatatan dilakukan oleh bagian akuntansi
 2. Penaksiran Resiko
Sistem Informasi Yang Baru Atau Yang Baru di perbaiki
Sistem Prosedur Pengeluaran kas pada PT. Jamsostek bisa terjadi perubahan sesuai dengan apa yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan data keuangan yang konsisten dalam laporan keuangan.
 3. Aktivitas Pengendalian
PT. JAMSOSTEK mempunyai sistem Prosedur pengeluaran kas dalam hal ini Klaim asuransi. Prosedur ini membantu proses transaksi di bawah arahan Manajemen atau kepala bagian keuangan untuk memisahkan tugas atau tanggung jawab karyawan.
 4. Informasi dan Komunikasi
Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan.
Dalam organisasi perusahaan setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi. Pada PT. JAMSOSTEK setiap dokumen yang digunakan dalam sistem pembayaran klaim harus diotorisasi oleh verifikator jaminan dan kepala bagian keuangan, seperti cek, voucher pembayaran, data pendukung. Pencatatan dilakukan berdasarkan rincian pembayaran yang dibuat, cek, voucher pembayaran, data pendukung yang telah diotorisasi oleh verifikator jaminan dan kepala bagian keuangan.
 5. Pemantauan
Praktik yang sehat
Perincian pembayaran klaim, voucher pembayaran jaminan, cek dan data pendukungnya harus dicetak kuitansinya setelah dilakukan pembayaran klaim. Hal ini untuk menghindari dari penyalahgunaan dan penyelewengan karyawan. Formulir atau dokumen yang digunakan pada pengeluaran kas pembayaran klaim asuransi PT. JAMSOSTEK telah menggunakan nomor urut cetak. Tujuannya agar dapat menetapkan pertanggung jawaban lebih mudah dilakukan.
Kepala bagian atau auditor Pada PT. JAMSOSTEK selalu memantau penentuan desain prosedur pengeluaran kas klaim asuransi untuk pengambilan tindakan apabila prosedur tersebut telah beroperasi sebagaimana yang diharapkan atau mengambil tindakan apabila terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. JAMSOSTEK di Manado, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan dari serangkaian hasil penelitian yaitu sistem dan prosedur pengeluaran kas pada PT. JAMSOSTEK sudah sepenuhnya memenuhi unsur-unsur pengendalian internal. Sistem pengeluaran kas PT. JAMSOSTEK telah sesuai dengan standar sistem dan prosedur pengeluaran kas pada umumnya karena telah

memenuhi unsur-unsur pengendalian internal yang berupa adanya struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui transaksi, dan praktik yang sehat dengan adanya perincian pembayaran untuk menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan karyawan setiap adanya transaksi, dokumen yang digunakan, serta prosedur pengeluaran kas yang terstandarisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes S, 2012, *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik* buku I edisi Empat, Jakarta: Salemba Empat.
- Arrens AA, Loebbecke 2007, *Auditing*, terjemahan Jusuf A, Jakarta: Salemba Empat.
- Auditing and Assurance Service : An Integrated Approach* edisi ketiga belas, 2009, Prentice Hall
- Baridwan, Zaki., 2007. *Intermedite Accounting*, BPFE, Yogyakarta
- Boyton, Jhonson, Walter G, 2007, *Modern Auditing* edisi ketujuh jilid I, ahli bahasa oleh Rajoe, Gania G, Jakarta: Erlangga.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Erlangga.
- Institut Akuntan Publik Indonesia, 2011, Jakarta: Salemba Empat.
- Kieso, Weygandt dan Warfield *Intermediate Accounting* edisi kedua belas, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi, 2008, *Auditing* edisi keenam, Jakarta: Salemba Empat.
- Sawyer B, Scheiner J, Dittenhofer M, 2006, *Internal Auditing* edisi 5, terjemahan Adhariani D, Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarso, Jakarta, 2008, *Akuntansi sebagai pengantar*: salemba empat
- Warren, Reeves M, Fess P, 2007, *Pengantar Akuntansi* edisi kedua puluh satu, terjemahan Faramita A, Hendrawan T, Jakarta: Salemba Empat.